

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PEMANFAATAN RUMPUT LAUT DI KELURAHAN PABIRINGA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO

Diva Fhadillah Az-zahra^{1*}, Ansyari Mone², Sudarmi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to find out how community empowerment was carried out by the Maritime Service. The research approach used was descriptive qualitative. By using data collection techniques through interviews Based on the results of research related to empowering coastal communities through the use of seaweed in Pabiringa Village, Binamu District, Jeneponto Regency, which was carried out by the Marine and Fisheries Service, Jeneponto Regency, it was quite good. This can be seen from several indicators of empowerment which include: enabling (creating) the local government creating an atmosphere that makes the potential of coastal communities in Pabiringa Village develop. Meanwhile, empowering strengthens the potential of coastal communities in Pabiringa Village through concrete steps by providing the necessary support and resources so that coastal communities can develop and improve their capabilities, skills and economic opportunities.

Keywords: *coastal communities, empowerment, seaweed*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara Berdasarkan hasil penelitian terkait pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan rumput laut di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten jenepono yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten jenepono cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator pemberdayaan yang meliputi: *enabling* (menciptakan) pemerintah setempat menciptakan suasana yang membuat potensi masyarakat pesisir yang ada di Kelurahan Pabiringa berkembang. Adapun *empowering* (memperkuat) memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat pesisir di Kelurahan Pabiringa melalui langkah-langkah nyata dengan menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan agar masyarakat pesisir dapat mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas, keterampilan, dan peluang ekonomi.

Kata kunci: masyarakat pesisir, pemberdayaan, rumput laut

* divafhadillah@gmail.com

PENDAHULUAN

Rumput laut telah tumbuh dan berkembang secara alami maupun budidaya, dimana peranannya cukup penting dalam industri pangan maupun non pangan yang menyebabkan permintaan pasar terhadap rumput laut terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga berperan sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat pesisir pantai di Kelurahan Pabiringa. Sayangnya, meskipun produksi rumput laut di kelurahan pabiringa melimpah, nilai ekonomi yang dihasilkan tidak semaksimal nilai yang semestinya bisa diperoleh.

Dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan, pada konsep pemberdayaan, dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya (*powerless*) agar mampu baik secara fisik maupun mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini mereka di pandang sebagai orang yang berperan penting untuk mengatasi masalahnya. Pemberdayaan merupakan suatu peningkatan kondisi kehidupan yang ditunjukkan kepada masyarakat.

Pada masyarakat pesisir penumbuhan kembali pendapatan

keluarga dengan berbagai usaha salah satunya dengan usaha membudidayakan rumput laut sebagai ladang usaha dalam menghidupi keluarganya. Rumput laut adalah sumber daya lokal yang banyak dihasilkan dan menjadi sumber penghasilan bagi sebagian besar penduduk yang ada di pesisir. Kelurahan Pabiringa mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian salah satunya dalam budidaya rumput laut yang merupakan salah satu komoditas perdagangan yang memiliki potensi yang sangat bagus di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Pemerintah Indonesia sudah berusaha melakukan penanggulangan kemiskinan sejak tahun 1998 sampai saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 40/PermenKP/2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengeloaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu membuat strategi dan program dalam menanggulangi kemiskinan tersebut melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), ada empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu: 1)

menyempurnakan program perlindungan social, 2) peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, 3) pemberdayaan masyarakat, dan 4) pembangunan yang inklusif.

Dari empat strategi di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus berdasar kepada upaya memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan (Rahman & Pansyah, 2019).

Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Sikhondze (dalam Karsidi, 2001), bahwa orientasi pemberdayaan haruslah membantu sasaran (masyarakat pesisir) agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada,

ditetapkan secara partisipatoris, dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat pesisir dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Sedangkan peran petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto (pendamping) sebagai outsider people adalah sebagai konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampai informasi. Dengan demikian peran serta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri) menjadi sangat dominan (Irawan & Tanzil, 2020).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir merupakan upaya pemerintah yang diprioritaskan di wilayah negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki potensi besar dibidang kelautan dan kemaritimannya. Seperti yang tertuang dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut UUD/No 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UUD No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses perencanaan pemanfaatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir serta pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah antar ekosistem darat dan laut serta antara ilmu pengetahuan dan

manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Lomboan et al., 2021)

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pedesaan perlu mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan agar menjadi kuat, maju dan mandiri. Pembangunan desa merupakan salah satu faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Perkembangan desa-desa di Indonesia berdasrakan Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri, bahwa perkembangan desa mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan, 29% pertahun. Namun sayangnya peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat desa (Fithriyana, 2020).

Pada dasarnya pemberdayaan dilakukan dengan terlebih dahulu melihat kondisi awal dari masyarakat yang akan diberdayakan. Pemberdayaan hadir tentunya dibarengi dengan alasan rasional yang telah dipikirkan matang-matang yaitu, membentuk masyarakat menjadi mandiri. Masyarakat yang mandiri, tentu saja diharapkan kedepan akan dapat terlepas dalam perangkap ketergantungannya terhadap perusahaan (Safni, 2019).

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan pertanggung jawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

Pemberdayaan masyarakat perlu digalakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Pembentukan kelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dengan dibekali keterampilan dan keahlian serta inovasi-inovasi tambahan mengenai pengelolaan rumput laut diharapkan bisa meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup masyarakat (Garis et al., 2019).

Memberdayakan masyarakat tentunya pemerintah berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus merupakan mandat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, sebagaimana pasal 57 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009. Sehingga peran dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sangat diperlukan guna

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. (Suhu & Wance, 2019)

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan tanggung jawab dari aparat Desa kepada masyarakat untuk memberi pelayanan ataupun bantuan. Dalam konteks ini masyarakat sebagai aktor utama pembangunan, sedangkan aparat desa berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut.

Sebagian masyarakat pesisir adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsistem, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu sangat pendek. Terkait hal ini pemerintah daerah berupaya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan dalam pemberdayaan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat di pesisir.

Menurut Bahuguna dan Kumari (2006) dalam buku "Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia" dijelaskan bahwa manajemen SDM menggunakan pendekatan yang lebih

terencana yaitu memilih orang yang tepat untuk dipekerjakan, memberikan pelatihan kepada mereka, menyusun desain pekerjaan, serta merancang system kompensasi termasuk rencana tunjang dan pelayanan yang diberikan untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan karyawan.

Menurut Slamet (2003) definisi pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat agar mampu membangun dirinya sendiri sehingga masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya.

Sumodiningrat (2004) menyatakan bahwa pemberdayaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

Menurut Daulay (2006), pemberdayaan adalah serangkaian wujud upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar memiliki posisi tawar sehingga mampu menjadi pelaku dalam proses pembangunan yang partisipatif dan aktif.

Secara umum definisi pemberdayaan adalah upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat, hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai manusia dan warga Negara. Selain itu pemberdayaan juga didefinisikan sebagai segala usaha untuk membebaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan (Margolang, 2018).

Menurut Chambers, (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable”.

Konsep pemberdayaan masyarakat yaitu upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk mengembangkannya. Pemberdayaan masyarakat berdaya melalui dorongan atau motivasi untuk membangkitkan kesadaran terhadap pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki (Suriyanti et al., 2022).

Mengutip buku Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat:

Pembangunan dan Pemberdayaan, yang ditulis Eko Sudarmanto dkk (2020:21), pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan.

Namun dalam upaya pembangunan ekonomi di desa memiliki banyak tantangan. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya berkaitan dengan kondisi eksternal dan internal. Kondisi eksternal seperti perkembangan internasional yang berhubungan dengan investasi dan perdagangan global. Sedangkan kondisi internal berkaitan dengan kondisi di dalam negeri seperti halnya ketahanan pangan, ketersediaan lapangan pertanian, permodalan, masalah sumber daya manusia (SDM), lingkungan dan sebagainya (Fithriyana, 2020).

Rumput laut merupakan salah satu sumberdaya penting yang terdapat di wilayah pesisir. Keberadaan rumput laut mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi pesisir di beberapa daerah di Indonesia (Wahyudin, 2012).

Rumput laut merupakan salah satu komoditi budidaya laut yang menjadi unggulan. Rumput laut merupakan komoditas penting untuk menopang tingkat perekonomian masyarakat.

Usaha tani rumput laut banyak diminati masyarakat dengan pertimbangan teknologi budidaya yang mudah, waktu pemeliharaan relatif singkat, dan pasar yang cukup tersedia, serta harga yang kompetitif (Rusli et al., 2020).

Rumput laut (*Euchema Sp.*) merupakan salah satu sumber daya alam hayati Indonesia, yang mempunyai nilai ekonomis penting dalam industri kosmetik, pangan dan kesehatan. Rumput laut banyak diolah dalam bentuk kering setelah melalui proses penjemuran atau menjadi makanan siap konsumsi, seperti dodol, manisan, selai, kerupuk dan minuman yang sudah dikenal masyarakat Indonesia. Rumput laut bermanfaat sebagai antioksidan, anti peradangan, anti diabetes dan anti kanker (Sanger & Assa, 2018).

METODE

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto, yang berlokasi di JL. HV. Worang (Komp. PPI Tanrusampe) Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu, Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan setelah surat izin penelitian diberikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni metode

penelitian yang dimana pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan, observasi dan dokumentasi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Pada pelaksanaannya, metode ini bersifat subjektif dimana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus pada landasan teori.

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang sistematis dan baku guna memperoleh informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

Teknik analisis data merupakan langkah yang dilakukan untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan analisis induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan membahas terlebih dahulu bentuk-bentuk pemberdayaan.

Bentuk Pemberdayaan Budidaya Rumput Laut

Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan memberdayakan masyarakat petani rumput laut melalui pelatihan yang di bagi menjadi 4 bentuk pelatihan. Yang pertama adalah presentasi metode pembudidayaan rumput laut dari awal proses budidaya hingga masa panen rumput laut, kedua adalah praktik pemasangan pondasi, ketiga adalah pelatihan pemasangan bibit dengan menggunakan tali dan botol bekas sebagai pelampungnya, dan yang keempat adalah berupa jenis bibit yang tepat digunakan di perairan tertentu.

Adapun pemberian bantuan pendanaan melalui APBD kota dapat membantu kebutuhan para petani rumput laut.

Menurut data DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto tahun 2022 anggaran yang dikeluarkan oleh APBD kota terhadap pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota Rp. 2.302.000.000.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto harus berupaya untuk melaksanakan koordinasi dengan menghubungkan petani rumput laut dengan perusahaan pengolahan rumput

laut.

Dari segi pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan masih kurang efektif, karena sudah ada beberapa produk dari manfaat pengelolaan rumput laut tapi belum dipasarkan.

Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Untuk meningkatkan kondisi perikanan dan memberdayakan nelayan, terutama nelayan miskin di wilayahnya, pemerintah Kabupaten sebaiknya melaksanakan hal-hal sebagai berikut: Memberikan Bantuan Alat Tangkap Bantuan alat tangkap adalah salah satu upaya paling penting untuk mensejahterakan masyarakat pesisir yang tinggal di pinggiran pantai khususnya para nelayan yang mata pencariannya dilaut. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana dan pemeliharaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Kabupaten perlu menambah jumlah TPI di setiap kecamatan. Selain itu Pemkab perlu menyediakan anggaran untuk perawatan dan tambahan sarana prasarana lain sehingga kegiatan pelelangan di Kabupaten akan lebih lancar. Pembinaan pembinaan dan sosiasasi baik teknis maupun non teknis perlu ditingkatkan, baik pembinaan yang

sifatnya rutin maupun pembinaan maupun sosialisasi yang insidental. Dinas Kelautan dan Perikanan saja namun juga harus melibatkan instansi-instansi terkait lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar dalam mengatasi persoalan yang cukup kompleks tidak hanya diselesaikan secara sepihak dan untuk mencegah terjadinya konflik yang tak berujung. Misalnya pembinaan teknis penangkapan dan budidaya perikanan laut, pembinaan kehidupan sosial ekonomi, sosialisasi hukum dan perundang-undangan, serta pembinaan/sosialisasi lainnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan yang membantu penyeleenggaraan lelang. pemasaran Untuk mengatasi kesulitan akses transportasi dan pemasaran hasil/produk perikanan diperlukan adanya koordinasi yang lebih intensif dan maksimal antar instansi terkait dengan perusahaan pelengan ikan.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti menemukan bahwa wilayah pesisir di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu adalah salah satu wilayah dari Kabupaten Jeneponto yang memiliki potensi sumberdaya perairan yang baik untuk mengembangkan usaha dibidang budidaya rumput laut.

Pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya perairan pantai di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu diarahkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya secara efektif, efisien, optimal, dan berkelanjutan melalui program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory* (Noor, 2011: 87). Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek (Noor, 2011: 87).

Enabling (Menciptakan)

Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat yang ada di Kelurahan Pabiringa dapat berkembang. Peningkatan keterampilan dan pendidikan masyarakat pesisir akan meningkatkan potensi mereka dalam

mengembangkan usaha dan mencari kesempatan kerja yang lebih baik. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan dan pendidikan yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.

Pemerintah harus mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya dan pembangunan wilayah mereka. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Pemerintah dapat membantu mempromosikan dan mendukung usaha lokal yang berbasis di sumber daya pesisir. Ini bisa dilakukan melalui dukungan keuangan, pelatihan wirausaha, atau akses ke pasar yang lebih luas.

Secara keseluruhan, pemerintah harus berperan aktif dalam mengidentifikasi dan memahami potensi dan menantang masyarakat pesisir serta melakukan tindakan nyata untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan potensi mereka berkembang secara berkelanjutan. Kesenambungan dan partisipasi aktif dari masyarakat pesisir juga merupakan

kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan potensi mereka berkembang secara berkelanjutan.

Empowering (Memperkuat)

Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat pesisir melalui langkah-langkah nyata yang melibatkan penyediaan berbagai masukan berarti melakukan tindakan konkret untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dengan menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan agar mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas, keterampilan, dan peluang ekonomi.

Langkah-langkah ini mencakup berbagai macam aspek, termasuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan pelatihan, infrastruktur, akses ke pasar, perlindungan sumber daya alam, kesejahteraan sosial, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan inovasi. Dengan tersedianya berbagai masukan dan dukungan ini diharapkan masyarakat pesisir dapat lebih berperan aktif dalam pembangunan wilayah mereka dan pencapaian keberlanjutan ekonomi serta lingkungan.

Sebagai contoh, penyediaan berbagai masukan berarti memberikan pelatihan dan keterampilan pendidikan bagi nelayan atau petani pesisir untuk

meningkatkan produktivitas mereka. Ini juga bisa berarti menyediakan bantuan modal usaha atau kredit dengan suku bunga rendah agar masyarakat pesisir dapat mengembangkan bisnis mereka. Pemerintah juga dapat membangun infrastruktur seperti pelabuhan atau akses jalan untuk meningkatkan konektivitas wilayah pesisir dengan pasar dan pusat perdagangan.

Selain itu, pemerintah perlu mendukung upaya dalam penyimpanan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan agar potensi ekonomi dari sektor seperti perikanan atau pariwisata pesisir tetap dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Pendekatan berbasis riset dan inovasi juga dapat membantu masyarakat pesisir dalam mengadopsi teknologi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, langkah-langkah ini harus merencanakan pemberdayaan masyarakat pesisir, partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan, dan pembangunan berkelanjutan, sehingga potensi yang dimiliki oleh masyarakat pesisir dapat benar-benar diperkuat dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi mereka dan wilayah pesisir secara keseluruhan.

Protecting (Melindungi)

Melindungi masyarakat pesisir, terutama kelompok-kelompok yang lemah, agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang merupakan upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat pesisir. Ini berarti memberikan perlindungan dan dukungan kepada kelompok-kelompok yang rentan dan kurang berdaya agar mereka dapat bersaing dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial wilayah pesisir dengan adil dan seimbang.

Beberapa contoh cara melindungi masyarakat pesisir, terutama kelompok lemah, adalah sebagai berikut: Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang inklusif untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan semua kelompok masyarakat pesisir diperhatikan dan diprioritaskan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Pastikan bahwa semua kelompok masyarakat pesisir memiliki akses yang setara dengan sumber daya alam dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur. Berikan kesempatan bagi kelompok-kelompok lemah untuk

berpartisipasi dalam ekonomi lokal dengan memberikan dukungan modal, pelatihan, dan akses ke pasar. Pertahankan dan tegakkan aturan hukum yang adil dan berlaku untuk semua, untuk mencegah pelanggaran kekerasan oleh kelompok yang kuat dan memastikan keadilan dalam persaingan ekonomi. Libatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, sehingga suara mereka didengar dan aspirasi mereka dipertimbangkan. Lakukan upaya aktif untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara keseluruhan, termasuk kelompok-kelompok lemah. Perhatikan kesetaraan gender dan berikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam mengakses sumber daya dan peluang di wilayah pesisir. Lakukan program edukasi dan kesadaran untuk melarang hak-hak masyarakat pesisir, memahami pentingnya keberlanjutan sumber daya alam, dan mensosialisasikan sikap yang adil dan inklusif dalam masyarakat.

Melindungi kelompok-kelompok yang lemah dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang di wilayah pesisir merupakan langkah penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, masyarakat pesisir dapat berkembang secara irasional dan harmonis, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah pesisir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang diperoleh di lapangan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Rumput Laut di Kelurahan Pabiringa Kabupaten Jeneponto yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Pabiringa sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jeneponto dengan seringnya pemberian bantuan kepada kelompok petani yang ada, baik berupa dana maupun alat-alat budidaya serta penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok tersebut dalam upaya memandirikan mereka agar usaha budidaya dapat berkembang dengan baik. Faktor penghambat dalam pembinaan Kelompok petani rumput laut adalah: Bantuan yang tidak tersalurkan secara tepat hal ini berkaitan erat dengan terbatasnya wawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat,

khususnya masyarakat petani rumput laut Kurangnya pemahaman para pelaku usaha akan pentingnya program pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto; dan Ketergantungan yang berlebihan dari pihak pembudidaya rumput laut terhadap bantuan dari pemerintah. Upaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jeneponto mengatasi hambatan dalam pemberdayaan Petani rumput laut di Kabupaten Jeneponto yaitu dengan: mengikutsertakan para pembudidaya dalam acara sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan yang melibatkan berbagai stakeholder untuk membuka wawasan dan pengetahuan berbisnis, penggunaan teknologi dan manajemen usaha.

REFERENSI

- Permana, A. F. (2021). Konseptualisasi Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), pp. 13–27. <https://ejournal.stais.ac.id/index.php/j-ebi/article/view/44>
- Fernanto, G., Amiruddin, S., & Maulana, D. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), pp. 194–214. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i1.13659>
- Fikry, M. S., & Ghozali, M. L. (2022). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di MWC NU Dukun dan Panceng Gresik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), pp. 2456–2472.
- Fithriyana, E. (2020). Pengolahan Produk Berbahan Dasar Buah Pepaya Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. *Al-Umron: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), pp. 1–9. <https://doi.org/10.36840/alumron.v1i2.301>
- Garis, R. R., Garvera, R. R., & Sari, P. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera melalui Inovasi Keripik Pisang Rumput Laut di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih. *Abdimas Galuh*, 1(1), p. 83. <https://doi.org/10.25157/ag.v1i1.2887>
- Irawan, A., & Tanzil, L. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 9(2), pp. 129–139. <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/3121>
- Labola, Y. A. (2019). Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, Bakat dan Ketahanan dalam Organisasi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 7(1). <https://doi.org/10.26905/jmdk.v7i1.2760>
- Lomboan, D. V. Y., Ruru, J., & Londa, V. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(102), p. 28.

- Margolang, N. (2018). Strategi Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani. *Jurnal Argo Riau*, 2(4), pp. 1–8. *Perikanan*, 6(2), p. 51. <https://doi.org/10.35800/mthp.6.2.2018.19930>
- Paramita, A., & Syachbrani, W. (2019). Nilai Keekonomian Usaha Rumput Laut di Sulawesi Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 2(2), pp. 1–12.
- Rahman, M. Z., & Pansyah, D. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Hutan Mangrove untuk Budidaya Kepiting Bakau Desa Eat Mayang Sekotong Timur Lombok Barat. *Jurnal Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan*, 7(2), pp. 1–10.
- RAHMAYANTI, R., ROMPAS, W. Y., & PLANGITEN, N. N. (2020). Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Malalayang Ii Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(92).
- Rusli, A., Dahlia, D., Ilijas, M. I., Alias, M., & Budiman, B. (2020). Strategi pengelolaan budidaya rumput laut *Kappaphycus alvarezii* di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. *Agrokompleks*, 20(1), pp. 28–38. <https://doi.org/10.51978/japp.v20i1.153>
- Safni, I. (2019). Berdaya Lewat Rumput Laut Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlash*, 4(1), pp. 30–52. <https://doi.org/10.31602/jpai.v4i1.1628>
- Sanger, G., & Assa, Y. R. (2018). Pengembangan Produksi Minuman Rumput Laut *Euchema Cottonii* di Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang, Kota Manado. *Media Teknologi Hasil*